

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang dilakukan terhadap mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat, penulis menarik kesimpulan bahwa;

- a. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan laporan keuangan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data keuangan dari berbagai unit dan departemen dalam BPK RI, yang kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Mekanisme penyusunan laporan keuangan, BPK RI juga melibatkan proses review dan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, BPK RI dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan lembaga, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

- b. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dan

sistematis. Proses ini dimulai dari pengumpulan data keuangan yang akurat dan relevan dari berbagai unit kerja di BPK RI. Data tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis untuk memastikan kebenaran dan keandalan informasi yang disajikan. Setelah itu, data keuangan yang telah diverifikasi dikompilasi dan disusun dalam format laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

- c. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut melalui proses review internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses review ini mencakup pemeriksaan oleh berbagai tingkatan manajemen di BPK RI untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kelalaian yang signifikan. Setelah review internal selesai, laporan keuangan kemudian disahkan oleh otoritas yang berwenang di BPK RI sebelum akhirnya dipublikasikan untuk kepentingan stakeholders. Dengan demikian, mekanisme penyajian laporan keuangan BPK RI bertujuan untuk menghasilkan laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan akuntabilitas publik.

Laporan ini memberikan gambaran yang cukup rinci tentang praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk dasar pengukuran, kebijakan akuntansi, dan pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangannya. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari laporan tersebut:

1. Basis Akuntansi: Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan basis akrual untuk penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE), sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas.
2. Dasar Pengukuran: Penyajian laporan keuangan BPK menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan, sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah.

3. Kebijakan Akuntansi: Laporan keuangan BPK menggunakan mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah. Kebijakan akuntansi yang digunakan mencakup prinsip, dasar, konveksi, aturan, dan praktik-praktik spesifik yang ditetapkan oleh BPK. Pengakuan pendapatan dan beban dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan

4. Pendapatan-LRA: Pendapatan LRA diakui saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Pendapatan tersebut diakui menggunakan azas bruto dan disajikan berdasarkan pengelompokan sumber pendapatan.

5. Belanja: Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja dan klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

6. Pendapatan-LO: Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan realisasi. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan secara khusus sesuai dengan jenis pendapatan yang bersangkutan.

7. Neraca: Aset dicatat pada saat diterima atau dialihkannya hak kepemilikan. Aset dibagi menjadi aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya.

Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh BPK, serta proses pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Dari informasi yang diberikan, terdapat beberapa aspek penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, serta pengelompokan dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan.

Berikut adalah beberapa saran untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPK:

1. **Konsistensi dalam Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP):** Pastikan bahwa laporan keuangan BPK tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan.
2. **Pengakuan Pendapatan dengan Jelas:** Pastikan bahwa pendapatan diakui dengan jelas sesuai dengan prinsip akrual, di mana pendapatan diakui saat hak atasnya timbul dan dapat diukur dengan baik. Keterangan yang rinci dan transparan tentang sumber pendapatan serta metode pengakuan pendapatan perlu disertakan.
3. **Pengukuran Aset dan Kewajiban yang Akurat:** Aset dan kewajiban BPK harus diukur dengan tepat menggunakan nilai perolehan historis atau nilai wajar yang sesuai. Pastikan bahwa proses pengukuran ini dilakukan secara konsisten dan menggambarkan nilai aktual dari aset dan kewajiban.
4. **Pengelompokan dan Pengungkapan yang Jelas:** Setiap pos laporan keuangan, seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban, harus dielompokkan dengan jelas dan disajikan dengan detail yang memadai. Pengungkapan tambahan juga perlu disertakan jika diperlukan untuk memahami transaksi atau peristiwa tertentu dengan lebih baik.
5. **Penyisihan dan Pengungkapan Piutang Tak Tertagih:** Penting untuk melakukan penyisihan yang tepat untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Pengungkapan tentang metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan tersebut juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko piutang.

6. Pengelolaan Persediaan dengan Tepat: Persediaan perlu dikelola dengan hati-hati, termasuk dalam hal pencatatan, penilaian, dan pengungkapan. Pastikan bahwa persediaan dicatat dengan benar sesuai dengan metode yang dipilih (misalnya, FIFO) dan nilai persediaan tercermin secara akurat dalam laporan keuangan.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan keuangan BPK harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Evaluasi dan Revisi Berkelanjutan: Lakukan evaluasi berkala terhadap proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta siap untuk melakukan revisi jika diperlukan agar laporan tersebut tetap relevan dan akurat.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan laporan keuangan BPK dapat memberikan gambaran yang akurat dan transparan tentang kondisi keuangan dan kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi adalah keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan BPK Tahun Anggaran 2022. Data dari tahun-tahun sebelumnya atau setelahnya mungkin tidak tersedia atau belum diolah, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian.

Keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya yang terbatas. Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk mencakup lebih banyak variabel dan analisis yang lebih rinci.

Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan bahwa pembaca dan pengguna hasil penelitian ini dapat menginterpretasikan temuan dengan mempertimbangkan batasan-batasan tersebut dan tidak menggeneralisasi hasil penelitian ini di luar konteks yang diteliti.

